

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.Z Nasution, (1) Tinjauan sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
_____ (2) Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, 2007
- Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana, 2011.
- Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bojongsarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998.
- Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikat dan keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditia, 2003.
- Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta: Prenada, 2004.
- Hans Kelsen, General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Somardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995.
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yahng Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, Surabaya: Putra Media Nusantara & ITSPress Surabaya, 2009.
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, 2004.
- M.Fuad, (et.al), Pengantar Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1) Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, 1975.
_____ (2) Pengantar Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000.

- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- NM. Wahyu Kuncoro, 97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Philipus M Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignyo, Syachran Basah, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law, Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Phillip Kotler, Kevin L. Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, Jakarta: Erlangga, 2009.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1963.
- Rachmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sahat HMT Sinaga, Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak, Bandung: Pustaka Sutra, 2007.
- Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1999.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shidarta, Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi, Jakarta: Epistema Intitute, 2012.
- Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia (edisi revisi), Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Surabaya: Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1985.
- Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudarto dalam Alo Liliwari, Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan, Bandung: Balai Citra Aditya Bakti, 1996.
- Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Urip Santoso, (1) Hukum Perumahan, Surabaya: Kencana Prenada Group, 2014.
- (2) Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2010.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha.

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/Pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2002 Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Ippt).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 Tentang Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN.

Pranala

<http://sp2010.bps.go.id/>

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>.

<http://bandungkota.bps.go.id/publikasi/kota-bandung-dalam-angka-tahun-2014>.

<http://bppt.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/008>.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-pseudowetgeving.html>

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1268>.